

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Ketika kita berbicara tentang keistimewaan Yogyakarta, tentunya tidak terlepas dari sejarah integrasi Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta adalah satu dari empat provinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri karena menyandang status istimewa, seperti halnya Nangroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Papua yang menyandang status otonomi khusus, namun berbeda pada hal-hal tertentu. Yogyakarta bila dilihat dari persepektif sosio-demografis merupakan miniatur Indonesia karena bagaimanapun Yogyakarta tempat berkumpulnya suku, agama, ras, budaya yang ada diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup>

Catatan sejarah membuktikan Daerah Istimewa Yogyakarta menyandang status keistimewaan sejak 15 Agustus 1950, setelah keluarnya undang-undang No 3 tahun 1950 yang kemudian berubah menjadi undang-undang No 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Keistimewaan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan manifestasi dari amanat 5 September 1945 yang menyatakan integrasi

---

<sup>1</sup> Atmakusumah, *Tahta Untuk rakyat; celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Pt gramedia pustaka utama, 1982), hal. 133

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Keistimewaan Yogyakarta yang termuat dalam amanat 5 September 1945, terbagai kedalam tiga substansi dasar. Yang pertama keistimewaan Yogyakarta terletak pada pengolahan kebudayaan dimana Yogyakarta diberi keleluasaan untuk mengelola kebudayaan lokal seperti keraton, transformasi nilai-nilai pendidikan dan sultan yang dijadikan mediator kosmologi antara misi kerajaan Islam dengan pluralisme. Kedua terletak pada pengolahan pertanahan dimana Yogyakarta dalam hal ini keraton berhak mengelola tanah di Yogyakarta yang secara yuridiksinya milik kekuasaan kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga pengolahan politik dan pemerintah atau kepemimpinan kesultanan artinya Yogyakarta diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme pengangkatan Kesultanan. Namun masuk pada masa pasca reformasi permasalahan keistimewaan Yogyakarta seolah-olah hanya tertumpuk pada masalah mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status keistimewaan yang diterima Yogyakarta tidak serta merta berjalan linier sesuai yang diinginkan, justru keistimewaan ini menuai kontroversi yang menimbulkan friksi dan perdebatan yang panjang tak berujung. Secara rasional harusnya status keistimewaan Yogyakarta memiliki nilai (*value*) yang positif.

---

<sup>2</sup> Selosoemardjan, *Social Changes in Jogjakarta* ( New York: Cornell University Press, 1962), hal.92

Namun melihat permasalahan belakangan ini keistimewaan justru menuai pro kontra bahkan berpotensi menimbulkan konflik politik yang krusial.

Perdebatan dan pro kontra tentang keistimewaan Yogyakarta selalu saja terjadi, jika masa jabatan Sri Sultan Hamungku Bowono X dan Sri Paduka Paku Alam VII akan berakhir. Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (eksekutif) maupun (legislatif) baik pusat dan daerah selalu saja terjadi. Suksesi gubernur III pada tahun 2008 menjadi arena perdebatan dan silang pendapat yang sempat mencuri perhatian publik dan masyarakat Yogyakarta khususnya. Kasus ini juga menjadi bukti kongkrit kekisruhan status keistimewaan Yogyakarta. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan enam fraksi pun saling pro dan kontra. Sebagian besar partai menilai keistimewaan Yogyakarta harus dipertahankan mengingat ini adalah kehendak rakyat. Ada lagi fraksi lain seperti fraksi Partai Demokrat melihat keistimewaan haruslah diperbaharui mengingat Indonesia menganut sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tidak sejalan dengan sistem feodalistik yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>3</sup>

Pro kontra yang terjadi ini setidaknya dipicu oleh sikap politik partai yang tidak satu suara untuk memutuskan bagaimana sistem keistimewaan yang baik dan tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Indonesia.

---

<sup>3</sup> A. Ariobimo Nusantara, . *Sri Sultan Hamengku Buwono X: meneguhkan tahta untuk rakyat*( Jakarta: Grasindo 1999) hal 147

Partai Demokrat dalam hal ini selaku pihak yang kontra terhadap keistimewaan Yogyakarta berbeda sikap dengan partai lainnya. Bagi Partai Demokrat draf rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta akan tetap dibahas walau pun tidak sesuai dengan yang dikehendaki sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Sebuah situasi yang rumit.<sup>4</sup>

Situasi yang tidak menentu atas status keistimewaan Yogyakarta ini, kemudian diperparah oleh pernyataan (*statement*) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat terbatas di kantornya yang menyatakan “Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.”<sup>5</sup> Pernyataan ini dianggap pelbagai kalangan baik kalangan keraton, maupun para akademisi sebagai sebuah penggugatan terhadap status keistimewaan Yogyakarta.

Pernyataan yang kontroversial ini tentunya memicu ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap politik pemerintah pusat yang sering berubah-ubah dan tidak jelas ujung pangkalnya tentunya membuat status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tidak kondusif, dalam hal ini sistem ketatapemerintahannya. Bukan hanya

---

<sup>4</sup> Nasrullah, *mengkritik Draft “akademis” RUU Keistimewaan DIY* dalam (e.d) Heru Nugroho *interpretasi kritis keistimewaan yogyakarta* (yogyakarta: forum bulaksumur *School Of Thought* 2002) hlm 85

<sup>5</sup> <http://waraskita.net/politik/pidato-sby-tentang-keistimewaan-yogjakarta.html> akses 15 september 2011

pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pun belum satu suara menentukan status keistimewaan Yogyakarta.

Dalam menanggapi keistimewaan Yogyakarta yang tersaji dalam draf undang-undang keistimewaan Yogyakarta, partai politik yang ada di DPR-RI yang tergabung kedalam sembilan fraksi belum menyatukan suara bagaimana sikap politik yang akan di ambil apakah menolak atau menerima status keistimewaan Yogyakarta. Partai politik seperti Golongan Karya, PDI-Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP menyatakan akan menerima keistimewaan sesuai apa yang diaspirasikan rakyat Yogyakarta, sisanya belum memilih sikap dan Partai Demokrat tetap akan memformulasikan keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku dewan kehormatan partai . Berikut sikap partai politik di DPR-RI;

Tabel. 1.1

**Sikap Politik Partai Politik di DPR-RI Terhadap Keistimewaan Yogyakarta**

| No | Nama Partai    | Sikap Politik  | Keterangan                                    |
|----|----------------|--|---|
| 1  | GOLKAR         | Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan keistimewaan Yogyakarta  | Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar          |
| 2  | PDI-Perjuangan | Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memosisikan dirinya sebagai gubernur dan Sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak menjadi milik partai politik tertentu | Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan          |
| 3  | PKS            | PKS menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat Yogyakarta. Kami pernah survei, dan umumnya warga Yogyakarta pilih penetapan   | Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS              |
| 4  | PAN            | Sebelum menentukan sikap, kami akan menimbang kelebihan dan kekurangan naskah RUU usulan pemerintah  | Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN DPR      |
| 5  | PPP            | Perkembangan historis, sosial, dan politik membuat kami memutuskan mendukung penetapan. Persoalan jika sultan dinilai terlalu tua atau masih kanak-kanak bisa diatasi dengan membuat aturan perwalian.   | M Romahurmuzly, Sekretaris FPPP DPR           |
| 6  | PKB            | Kami belum bisa menentukan sikap karena belum menerima draft RUU dari pemerintah   | Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB DPR            |
| 7  | GERINDRA       | Kami mendukung Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Namun, Sultan harus meninggalkan posisinya di partai politik, karena dia milik semua golongan  | Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| 8 | HANURA          | Kami tetap menginginkan penetapan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Sikap ini untuk menghormati keistimewaan Yogyakarta, penghargaan kepada sejarah daerah itu, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Yogyakarta | Sarifuddin Sudding,<br>Wakil Ketua Fraksi<br>Hanura DPR |
| 9 | Partai Demokrat | "Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.  | Susilo Bambang<br>Yudhoyono, Dewan<br>Penasehat Partai  |

Sumber: Data diolah hasil dari situs [www.hminews.com](http://www.hminews.com)

Dalam pandangan dan sikap politik partai yang ada di DPR-RI yang telah di deskriptifkan di atas, maka dari sembilan fraksi yang ada di DPR-RI hanya Partai Demokrat yang belum menentukan sikap dan cenderung akan menolak keistimewaan Yogyakarta. Paling tidak sampai penelitian ini ditulis. Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu tahun 2009 belum mengambil sikap politik apakah mendukung keistimewaan Yogyakarta dengan segala substansi keistimewaannya, atau malah sebaliknya menolak keistimewaan Yogyakarta. Belum jelasnya sikap politik ini tentunya menyebabkan lambannya pembahasan draf RUU keistimewaan yang akan dibahas di DPR-RI.

Tidak jauh berbeda dengan DPP Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Provinsi DIY juga bersikap serupa. DPD Partai Demokrat DIY tidak menunjukkan sikap politik yang jelas terhadap kisruh keistimewaan Yogyakarta. Dalam rapat paripurna tanggal 13 Desember 2010 yang membahas sikap DPRD Provinsi DIY

terhadap status keistimewaan Yogyakarta khususnya mekanisme pengangkatan Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paduka Paku Alaman ke VII, fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk *walk out* atau meninggalkan ruang sidang dengan alasan yang tidak jelas. Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Provinsi DIY, hanya satu fraksi yang tidak menyetujui Mekanisme Pengangkatan Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paduka Paku Alaman ke VII dengan cara penetapan yaitu fraksi Partai Demokrat.<sup>6</sup> Adapun sikap politik fraksi di DPRD Provinsi DIY sebagai berikut;

**Tabel. 1.2**

**Sikap Politik Fraksi Partai Politik di DPRD Provinsi DIY  
Dalam Menentukan Mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur DIY**

| No | Partai/Fraksi   | Sikap Politik     |
|----|-----------------|-------------------|
| 1  | Partai GOLKAR   | Penetapan         |
| 2  | PDI-Perjuangan  | Penetapan         |
| 3  | Partai Demokrat | Menolak Penetapan |
| 4  | PNPI Raya       | Penetapan         |
| 5  | PAN             | Penetapan         |
| 6  | PKS             | Penetapan         |
| 7  | PKB             | Penetapan         |

Sumber: data diolah dari hasil rapat paripurna DPRD DIY, 13 Desember 2010

<sup>6</sup> <http://antaranews.com/keputusan-dprd-diy-tidak-bisa-diabaikan.html> akses 18 september 2011

Sikap politik fraksi Partai Demokrat Provinsi DIY yang tidak sejalan dengan enam fraksi lainnya yang menegaskan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alaman VII diangkat dengan cara penetapan bukan pemilihan langsung nampaknya sejalan dengan DPP Partai Demokrat yang juga tidak memberikan sikap politik yang jelas apakah tetap mendukung penetapan atau menolak penetapan. Namun bila melihat sikap politik DPC kabupaten dan kota seperti DPC Kota Yogyakarta, DPC Kabupaten Bantul dan DPC Kabupaten Sleman justru menyampaikan sikap politik yang berbeda dimana DPC KOTA Yogyakarta, DPC Kabupaten Bantul, DPC Kabupaten Sleman menegaskan akan terus mendukung pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alaman VII dengan cara penetapan bukan pemilihan langsung. Menarik memang ketika melihat sikap politik Partai Demokrat terhadap status keistimewaan Yogyakarta, antara pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota karena sikap politik masing-masing pengurus berbeda-beda, dan menjadi ketertarikan tersendiri.

Keadaan atau situasi yang seperti ini memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan menjadikan Partai Demokrat sebagai objek penelitian, karena peran Partai Demokrat menjadi sangat vital. Setidaknya sikap Partai Demokrat khususnya DPD Partai Demokrat Provinsi DIY nantinya menjadi penentu apakah keistimewaan Yogyakarta tetap seperti yang diamanatkan dalam amanat 5 september 1945 atau berubah. Sikap politik yang pasti dan tidak

“mengambang” diperlukan untuk satu sikap politik yang bulat dari DPRD Provinsi DIY yang nantinya akan direkomendasikan ke DPR-RI dalam pembahasan RUU keistimewaan Yogyakarta.

Bila mencermati situasi yang telah diuraikan di atas, penulis tentunya sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Sikap Politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2009-2011”. Dengan tiga substansi keistimewaan sebagaimana yang disebutkan dalam amanat 5 Oktober 1945, 30 Oktober 1945, UU No.3 tahun 1950 dan amanat piagam kedudukan 5 September 1945.<sup>7</sup> Harapan penulis penelitian ini dapat berguna dimasa depan, sehingga diskursus, dialektika yang selama ini telah dilakukan oleh akademisi, para ahli, elit politik, bahkan tukang becak sekali pun tidak sia-sia adanya.

## **B. Rumusan Masalah.**

Dari hasil uraian latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Sikap Politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keistimewaan Yogyakarta tahun 2009-2011 ?

---

<sup>7</sup> <http://wikipedia-Sejarah-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.html> akses 18 september 2011

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta tahun 2009-2011 .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor munculnya sikap politik DPD Partai Demokrat terhadap status keistimewaan Yogyakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun nilai kegunaan dalam penelitian ini adalah;

1. Secara Teoritis : hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan insan akademisi dalam menambah wawasan khasanah keilmuan di bidang politik, khususnya sikap politik partai terhadap kasus-kasus tertentu serta dapat di kembangkan menjadi sebuah rujukan penulisan penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan bahkan rekomendasi kepada DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengambil sikap politik terhadap keistimewaan Yogyakarta.

### **E. Kerangka Dasar Teori**

Keberadaan teori dalam sebuah penelitian sudah barang tentu pasti sangat penting, karena selain sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara

sintaksi yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis untuk meramalkan atau menjelaskan fenomena tertentu, teori juga dapat menggambarkan bobot dari sebuah penelitian.

Menurut F.N, Kerlinger, dalam bukunya *Foundating of Behavioral Research* mengatakan bahwa:

“Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Koentjaraningrat bahwa:

“Teori merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”<sup>9</sup>

Berikut landasan teori yang dapat dipakai dalam penelitian ini.

## 1. Sikap Politik

### a. Sikap

#### 1) Definisi sikap

Sikap menurut pendapat F.Engel adalah suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan berfikir (neural) yang dipersiapkan sebagai tanggapan suatu objek, yang di organisasikan melalui pengalaman secara langsung atau secara dinamis pada perilaku. Selain definisi diatas ada beberapa ahli telah

---

<sup>8</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar penelitian kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).hlm 45

<sup>9</sup> Koentjaraningrat., *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta : PT Gramedia, 1990) hlm 9

merumuskan sebuah definisi sikap paling tidak dalam tiga kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut;<sup>10</sup>

- a) Louis Thurstone: Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Secara lebih spesifik sikap diformulasikan sebagai “derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologi”.
- b) Gordon Allport: sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, atau suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulan sosial yang terkondisikan
- c) Secord dan Beckman: Sikap adalah konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek artinya sikap diartikan sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi) pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya.
- d) Petty dan Cacioppo: Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek dan isu-isu tertentu.

Sikap menempatkan seseorang dalam kerangka berpikir untuk menyukai atau tidak menyukai, bergerak atau tidak bergerak, mendekat atau menjau, menerima atau menolak dari satu hal objek tertentu. Dengan kata lain sikap biasanya memberikan penilaian tersendiri apa sikapnya.<sup>11</sup> Berikut

---

<sup>10</sup> Saifuuddin Azwar., *sikap manusia teori dan pengukurannya* (Yogyakarta;pustaka pelajar 1995), hal

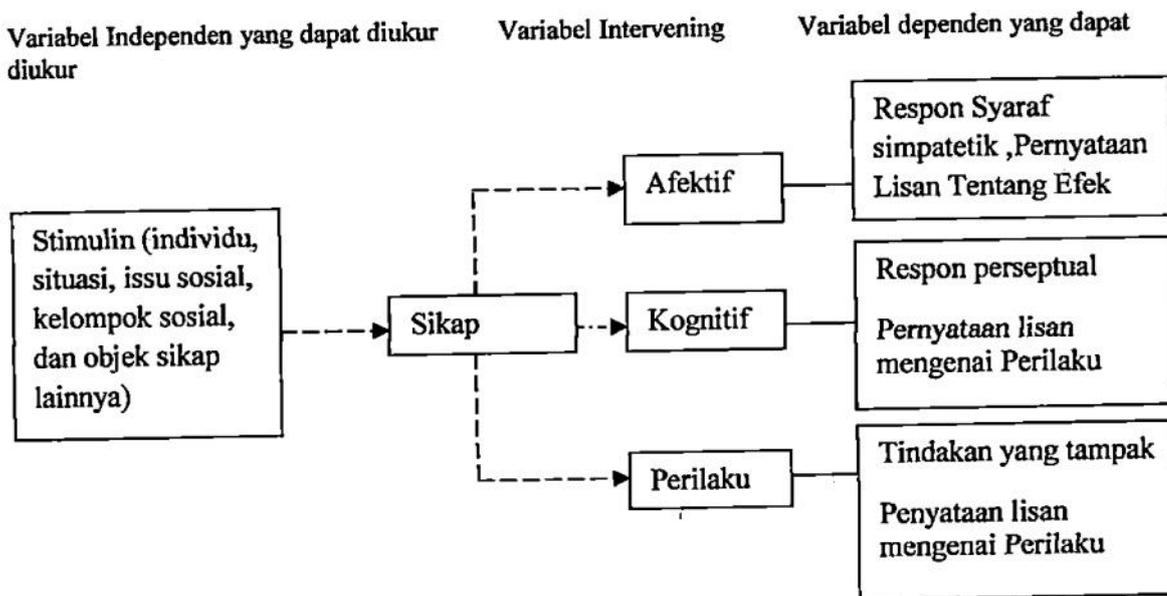
5

<sup>11</sup> <http://definispengertian.com/2011/pengertian-sifat/> akses 28 september 2011

konsepsi dan skematik sikap yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen 1975.

Gambar. 1.1

**Konsepsi Skematik Mengenai Sikap Diolah Dari Fishbein dan Ajzen 1975**



Sumber: diolah dari Azwar, sikap manusia teori dan pengukurannya 1995

2) Karakteristik (dimensi) sikap

Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, Sax mengatakan ada beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu arah, intensitas, keluasan dan konsistensi. Berikut dimensi-dimensi tersebut;<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Saifuuddin Azwar.,op.cit hal 87-88

a) Arah

Sikap mempunyai **arah**, artinya sikap terpilih pada dua arah kesetujuan yaitu setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu isu atau seseorang sebagai objek. Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif, sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan mereka sebagai sikap yang negatif.

b) Intensitas

Sikap memiliki **intensitas**, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walupun arahnya mungkin tidak berbeda atau sama. Dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu, yaitu sama-sama memiliki sikap berarah negatif belum tentu memiliki sikap yang negatif yang sama intensitasnya. Orang pertama mungkin tidak setuju tapi orang kedua dapat saja sangat tidak setuju atau sebaliknya.

c) Keluasan

Sikap memiliki **keluasan**, maksudnya kesetujuan atau tidak setuju terhadap suatu objek. Sikap dapat saja hanya mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali yang ada pada objek sikap.

d) Konsistensi

sikap juga memiliki **konsistensi**, artinya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam diri individu atau kelompok untuk waktu yang relatif lebih lama. Sikap yang gampang berubah biasanya disebut sikap yang inkonsistensi.

## b. Politik

### 1. Definisi Politik

Dalam Bahasa Arab politik disebut dengan “Siyasyah” atau dalam Bahasa Inggrisnya “Politics”. Secara akar bahasa estemologi politik berasal dari kata “Polis” yang berarti “Negara Kota”<sup>13</sup>. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai cara yang dicapai untuk mewujudkan tujuan bersama.<sup>14</sup>

Dalam mendefinisikan politik para ahli politik sepakat banyak sekali spektrum yang harus dikaji karena sifatnya sangat kompleks. Para ahli politik cenderung untuk menekankan salah satu dari konsep-konsep itu, namun tetap sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public polity*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*)<sup>15</sup>

Politik dalam definisi yang baik seperti yang diungkapkan Peter Merkl yaitu politik adalah usaha untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang baik

---

<sup>13</sup> Rusadi Kantaprawira, S.H. *Sistem politik Indonesia* (Bandung: Sinar baru 1947), hal 10

<sup>14</sup> Inu Kencana. *Alquran dan ilmu politik*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996), 74

<sup>15</sup> Budiarto, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.14

dan berkeadilan. Artinya politik menghendaki tercapainya suatu masyarakat yang lebih baik dari pada apa yang dihadapinya.<sup>16</sup>

Disisi lain politik juga dipandang sebagai konsep yang negatif karena politik terdapat dalam sebuah tabiat manusia yang buruk dimana perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri sehingga kerap menimbulkan konflik. Secara definitif diungkapkan oleh beberapa ahli politik seperti

- a) Rod Hague : politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.<sup>17</sup>
- b) Andrew Heywood : politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>18</sup>

### c. Definisi Sikap Politik

Sikap politik adalah : suatu keadaan jiwa dan keadaan berfikir yang berkaitan dengan isu atau keputusan politik yang diorganisir melalui pengalaman secara langsung atau secara dinamis terhadap perilaku. Artinya keadaan dimana jiwa yang tergadung dalam sebuah fikiran baik itu keputusan

---

<sup>16</sup> Peter H. Merkl, *Continuity and change*.(New York: haper and row 1967).,hal 13

<sup>17</sup> Rod Hague at al., *comparative governmen and politics* (London:macmilian press 1998)., hlm 3

<sup>18</sup> Andrew Heywood, *politics* dalam Budiarjo.,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.16

atau hal lainnya yang berkaitan dengan isu politik. Selain itu sikap politik juga dapat didefinisikan sebagai evaluasi diri yang dilakukan oleh dirinya sendiri, orang lain dan organisasi terhadap objek atau isu politik.

## 2. Partai Politik

### a. Sejarah Kemunculan Partai Politik

Berdasarkan aspek kesejarahan, partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Sejarah partai politik sejak awal lahirnya tidak biasa dipisahkan dari dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir di dalam parlemen dan lahir di ekstraparlemen.

Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade ke 18 di negara-negara seperti Prancis dan Inggris kegiatan politik di pusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen saja dan juga terinsirasi oleh model pemilihan pemimpin yang cenderung aristokrasi, karena sistem pemerintah yang dianut adalah monarki. Para petinggi kerajaan, setelah hak pilih mulai mendapat ruang segar, lambat laun mulai berani membentuk panitia-panitia pemilihan. Dan ini dilakukan dari dalam parlemen ke luar parlemen. Hal ini berjalan sangat harmonis antara mereka saling bekerjasama dan mengakomodir semua kepentingan mereka. Lahinya partai politik yang berembrio dari parlemen itu bersifat *patronage party* (partai pelindung).

Selanjutnya, sejarah perjalanan partai politik di Barat mengalami pergeseran sedikit demi sedikit. Partai politik dibentuk bukan atas permainan stereotype para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Partai-partai ini bedasar pada suatu pandangan ideology atau *weltanschauung* tertentu seperti sosialisme, fasisme, kristen demokrat, komunis dan sebagainya. Berbeda dengan karakter pertama, partai politik semacam ini memiliki aturan yang kuat dan pemimpinnya lebih terpusat.

Secara historiografis, ide dasar untuk membentuk partai politik sudah menunjuk indikasi pada era *Renaissance* dan *Aufklarung*. Dimana pada masa ini kekuasaan raja dikecam dan mulai dibatasi, sebenarnya keinginan pembentukan partai politik sudah mulai bermunculan. Terlebih hak pilih rakyat sudah diberikan secara luas.

Setelah perluasan hak-hak politik rakyat diberikan. Semakin pesat pula perjuangan untuk membentuk sebuah partai politik. Partai politik seolah-olah telah lahir dengan sendirinya secara spontan. Apa lagi keterlibatan rakyat terhadap politik semakin intens. Maka sebagai wujud interaksi antara pemerintah dengan rakyat, tentunya diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antar keduanya dan kendaraan politik tersebut akhirnya bernama partai politik.

## b. Definisi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi yang lain adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Sartori mengungkapkan istilah partai berasal dari bahasa latin (*partire*) yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi kata (*to be a part*) yang artinya menjadi bagian atau mengambil bagian. Artinya partai politik hanya menjadi salah satu organisasi yang menawarkan jalan untuk menuju pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sehingga keberadaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan cita-cita Bangsa dan Negara.<sup>19</sup>

Selain definisi di atas dalam rangka memahami partai politik yang masuk kedalam spektrum infrastruktur politik dalam sebuah negara ada beberapa definisi dari para ahli yang diantaranya sebagai berikut;

- 1) R.H. Soltou: Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

---

<sup>19</sup> Budiarjo., *op .cit.* hal 403

- 2) Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.<sup>20</sup>
- 3) Robert Huckshorn: Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara yang memiliki tujuan untuk membuat nominasi dan pemilihan bertarung dengan harapan mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan kantor publik dan organisasi pemerintah.
- 4) Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.<sup>21</sup>

Mendefinisikan partai politik memang bukan hal yang mudah dan cukup sulit untuk mencari objektifitasnya karena sesuatu yang bersifat normatif, sehingga definisi senantiasa berubah dari waktu-kewaktu. Selain itu definisi di setiap negarapun harus disamakan melalui sebuah landasan yuridis yang kuat, berikut definisi partai politik menurut undang-undang No 2 tahun 2008 dan No 31 tahun 2002 tentang partai politik;

“ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

<sup>20</sup> Friedrich. *constitutional Government and democracy*,. hlm 419

<sup>21</sup> Sigmund Neumann. *Modern political parties, dalam comparative political: A reader*, (ed) Harry Eckstein dan David E.Apter (London: The free [ress of glencoe,1963).,hal 352

negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”<sup>22</sup>

“Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”<sup>23</sup>

### c. Jenis Partai Politik.

Ketika membahas aktualisasi partai politik tentunya akan berkaitan dengan tipologi atau jenis partai politik serta mengidentifikasinya untuk kebutuhan penilai kinerja berikut adalah jenis partai politik.

- 1) jenis Partai *Proto* : tipe partai proto ini merupakan karakter dasar dari jenis awal partai politik, yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau interparlemen. Basis dukungan jenis partai politik ini adalah kelas menengah keatas. Bentuk organisasi dan ideologi relatif rendah. Belum sepenuhnya menjadi partai politik dalam ciri partai politik modern ciri faksional masih sangat menonjol, dan ciri yang jelas adalah perbedaan antara anggota dan non anggota.
- 2) Jenis Partai *Kader* : secara kilas sejarah jenis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya banyak dari kalangan menengah keatas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No 31 tahun 2002 tentang partai politik

ideologinya rendah sebab aktivitasnya jarang didasari pada program dan organisasi yang kuat.

- 3) Jenis Partai Massa : Berkembangnya partai politik jenis ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Partai ini dibentuk di luar parlemen (ekstra parlemen). Orientasi partai politik ini berbasis pada dukungan “wong cilik” menengah kebawah seperti petani, buruh, dan massa lainnya. Dengan tujuan untuk melakukan pendidikan politik dan sasaran kemenangan pemilu serta ideologi dan organisasinya berjalan rapi.
- 4) Jenis Partai Diktatorial : Jenis partai politik ini merupakan sebuah subtype dari partai massa. Ideologinya bersifat kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi memimpin dengan ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana anggota partai politik dituntut untuk sangat loyal dan patuh secara total.
- 5) Jenis Partai *Catch-all* : Jenis partai ini adalah kombinasi atau gabungan antara partai Kader dan partai massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya adalah memenangkan pemilu. Berkait dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan dan berideologi yang tidak terlalu

kaku.<sup>24</sup> Berikut ini adalah tipe atau jenis partai politik dari berdasarkan organisasi internal partai politik.

**Tabel. 1.3**

**Jenis Partai Politik Berdasarkan Organisasi Internal**

|                                   | <b>Partai Elit</b>              | <b>Partai Massa</b>           | <b>Partai Catch-all</b>                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Kemunculan</b>                 | Sebelum abad 19                 | 1880-1960                     | Setelah 1945                                      |
| <b>Asal</b>                       | Dalam Parlemen                  | Luar parlemen                 | Dikembangkan dari elit yang ada atau partai massa |
| <b>Massa Pendukung</b>            | Tradisional atas kepemimpinan   | Satu kelompok sosial          | Kelompok dan keterampilan dalam pemerintah        |
| <b>Anggota / Kader</b>            | Kecil dan Elit                  | Besar, berdasarkan keaggotaan | Penurunan, pemimpin partai lebih mendominasi      |
| <b>Sumber Pendapatan</b>          | Pribadi Elit                    | Iuran dari anggota            | Dari banyak sumber termasuk negara                |
| <b>Contoh partai di Indonesia</b> | postcommunist partai, PKS, PAN. | PDI-P                         | GOLKAR, Demokrat                                  |

Sumber :Data diolah dari *materi Studi Partai politik Tunjung Sulaksono 2010*

<sup>24</sup> Koirudin,. *Partai politik dan agenda transisi demokrasi* (Yogyakarta:pustaka pelajar ,2004).hal 78-80

#### d. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada didalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan diatas, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.<sup>25</sup>

- 1) Sistem Partai Tunggal adalah sistem dimana hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam sistem politik disuatu negara. Struktur organisasi sistem ini monopoli total, jarak ideologi tunggal, intensitas intervensi ideologi kuat monopolistik. Derajat kompetisi tidak akan terjadi.
- 2) Sistem Dwi Partai adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Dalam sistem kepartaian ini intensitas intervensi ideologi kuat namun derajat kompetisi tinggi.

---

<sup>25</sup> Ichlasul Amal., *Teori-teori muktahir partai politik*, (Yogyakarta ; Tiara Wacana 1996),. hal 45

- 3) Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan jaran ideologi antar partai yang tidak terlampau jauh.
- 4) Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan besarnya jarak ideologi antar partai.
- 5) Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya satu partai yang selalu memenangi kursi di parlemen. Seperti telah disebut, ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Sistem kepartaian seperti ini biasanya menyebabkan persaingan antar partai rendah dan intervensi ideologi biasa-biasa saja. Berikut ini adalah sistem kepartaian yang coba diklasifikasi oleh beberapa ahli ;

**Tabel. 1.4**  
**Sistem Kepartaian**

| Variabel                              | Atomis                   | Pluralisme terbatas | Pluralisme moderat | Dua partai              | Predominant                    | Hegemonik                  | Tunggal             |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Struktur kekuasaan                    | Fragmentasi seperti atom | Fragmentasi         | Fragmentasi        | Konsentris dan Seimbang | konsentris dan sedikit pilihan | konsentris & tanpa pilihan | monopoli total      |
| Jarak Ideologis                       | sangat tinggi            | sangat tinggi       | Tinggi             | Rendah                  | Rendah                         | Rendah                     | Tunggal             |
| Intensitas intervensi ideologi negara | tidak ada                | sangat rentan       | Rendah             | Kuat                    | Kuat                           | kuat (sangat rentan)       | kuat (monopolistik) |
| Arus interaksi                        | multilateral             | multilateral        | Multilateral       | Bilateral               | bilateral & multilateral       | Unilateral                 | tidak ada           |
| Derajat kompetisi                     | sangat tinggi            | sangat tinggi       | sangat tinggi      | Tinggi                  | Rendah                         | Rendah                     | tidak ada           |

Data diolah dari: Ichlasul Amal., *Teori-teori muktahir partai politik* 1999

#### e. Fungsi Partai Politik

- 1) Fungsi Artikulasi kepentingan : fungsi artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng *input*-an berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan , tuntutan dan kebutuhan kelompok dapat terwakili dan terlindungi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pemerintah dalam

mengeluarkan satu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat.

- 2) Fungsi Agregasi Kepentingan : fungsi ini adalah secara ideal adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai politik secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, maupun dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen” agregasi kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama oleh partai politik. Mulai dari peran penentuan kebijakan tingkat modernisasi yang tinggi sampai peran penentu yang bersifat krusial sekalipun.
- 3) Fungsi Sosialisasi Politik : sosialisasi politik merupakan suatu cara perkenalan terhadap nilai-nilai politik, sikap-sikap politik dan etika politik yang berlaku atau yang dianut di dalam sebuah negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dalam kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik yang tentunya membutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.
- 4) Fungsi Rekrutmen Politik : rekrutmen politik adalah suatu cara atau proses seleksi rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili

kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki prosedur rekrutmen yang berbeda-beda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan proses rekrutmen keanggotaan yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat . Salah satu tugas pokok dalam proses rekrutmen ini adalah bagaimana partai politik dapat menyediakan kader partai yang tentunya berkualitas untuk kelak menduduki posisi dilembaga legislatif.

- 5) Fungsi komunikasi Politik : komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, isu, gagasan dan ide politik. Media-media masa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Berkaitan dengan komunikasi politik yang terpenting untuk dicatat adalah bagaimana mereka dapat mengelolah komunikasi politik di internal partai mereka sendiri, baru kemudian berbicara komunikasi politik dengan pihak luar.<sup>26</sup>

### **3. Desentralisasi**

#### **a. Definisi Desentralisasi**

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam bentuk keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada

---

<sup>26</sup> Koirudin, *op. cit.*, hal. 86-103

level bawah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi dalam subuah kerangka organisasi pemerintah atau otonomi daerah adalah pemberian wewenang pusat ke level bawah provinsi, kota dan kabupaten dalam upaya menjalankan subuah keputusan dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat.<sup>27</sup>

Dalam perjalanan pemerintahan yang sifatnya sangat sentralistik yang seperti terjadi pada pemerintah orde baru mengakibatkan kebijakan pusat yang di transfer kedaerah sangat lamban dan memerlukan biaya yang besar karena “rute” birokrasi yang semakin panjang. Kondisi ini dijawab oleh sebagian ilmuan dengan menawarkan konsep desentraliasasi atau otonomi daerah dengan argumen sebagai berikut;

- 1) Efisiensi-efektifitas pemerintah daerah: pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dianggap sangat penting mengingat dalam pola pemerintah negara kesatuan daerah menjadi sangat penting peran nya dalam pembangunan negara. Oleh karena sistem sentralistik tidak begitu efektif dan efisien maka desentralisasi dirasa sangat optimal dalam menanggualangi masalah ini. Desentraliasi dianggap paling efektif, bagai mana tidak konsep ini dapat menekan biaya birokrasi, mengefektifkan aparatur pemerintah dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Afan Gaffar, dkk., *Otonomi daerah dalam negara kesatuan.*, (Yogyakarta ;Pustaka Pelajar 2002) hal 19

- 2) Pendidikan Politik: peran politik daerah yang sangat minim dalam sistem sentralistik dianggap tidak mendidik politik di level bawah. Pendidikan politik dirasa sangat penting karena dengan meningkatnya pendidikan politik secara otomatis segala program dan kebijakan pusat akan semakin mudah dipahami dan segera ditindak lanjuti dalam penerapan teknis di lapangan. Partisipasi politik untuk memilih dan dipilih dalam menentukan jabatan politik sangat penting sehingga penyelenggara politik akan semakin berjalan baik.
- 3) Stabilitas Politik: kalangan ilmuan politik atau pemerintah semuanya sepakat bahwa idealnya desentralisasi dapat menciptakan stabilitas politik. Stabilitas politik nasional harusnya berawal dari politik tingkat lokal. Bila kondisi politik nasional dalam keadaan yang kurang baik secara otomatis akan berdampak pada kondisi politik tingkat lokal.
- 4) kesetaraan Politik (*political equality*) : kesetaraan politik dibentuk dengan tujuan supaya pemerintah daerah dan masyarakat ditingkat daerah mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik apakah itu masuk dalam pemilihan kepala daerah atau secara individu melalui pemilihan legislatif. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat daerah setara dengan partisipasi politik ditingkat nasional.
- 5) Akuntabilitas Publik: akuntabilitas publik dalam sebuah konsep desentralisasi adalah bagaimana orang-orang yang menjabat posisi jabatan publik dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kebijakan dan

politiknya kepada warga masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya.<sup>28</sup>

#### b. Visi dan Konsep Desentralisasi

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah, untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-badan yang tidak perlu dalam urusan domestik. Selain itu pengkonsentrasian pembagian wewenang kebijakan kepada pemerintah menjadi hal yang sangat substansial untuk segera dilakukan. Pengembangan desentralisasi tentunya harus memiliki visi yang jelas dalam sebuah kerangka teori idealnya visi desentralisasi dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama politik, ekonomi serta sosial dan budaya.

- 1) Bidang politik: karena otonomi adalah buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara demokratis tentunya menjadi jawaban visi desentralisasi itu sendiri karena sebelum konsep ini dibuat atau diajukan oleh beberapa ahli kondisi dibidang politik masih sangat sentralistik.
- 2) Bidang ekonomi: otonomi atau desentralisasi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 20-30

dan di pihak lain pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Artinya, visi desentralisasi dapat memberikan keluluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sebuah optimalisasi pengembangan potensi daerah.

- 3) Bidang sosial budaya: desentralisasi harus dikelola sebaik mungkin untuk menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang di pandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan visi desentralisasi diatas, maka konsep dasar desentralisasi yang kemudian melandasi lahirnya UU No.22 tahun1999 dan UU No.25 tahun 1999 adalah hal-hal berikut ini;<sup>30</sup>

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah kecuali, untuk bidang keuangan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat strategik dan nasional.
- 2) Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-

---

<sup>29</sup> Ibid., hal 172-174

<sup>30</sup> Syamsuddin Haris., *Desentralisasi Dan Otonomi daerah* (APIJakarta 1999)., hal 56

fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan.

- 3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- 4) Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang memiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- 5) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman obligasi daerah.
- 6) Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat (*block grant*) pengaturan pembangian sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah.

### c. Fungsi Desentralisasi

Dari penjelesan visi dan konsep yang telah di jabarkan di atas tentunya desentralisasi memiliki fungsi yang besar dan diharapkan dapat mewujudkan daerah yang ideal dan memberikan dampak yang baik bagi percepatan pembangunan daerah. Berikut ini manfaat desentralisasi yang diungkapkan oleh Rondienlli (dalam Otonomi daerah Affan Gafar).<sup>31</sup>

- 1) Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pekerja di daerah yang bekerja dilapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat.
- 2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang sangat rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- 3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat daerah secara langsung, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat.
- 4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pemerintah pusat, dimana sering kali rencana pemerintah tidak di fahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit politik lokal.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 15

- 5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, agama, dalam sebuah perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam pengalokasian sumber daya alam dan investasi pemerintah.
- 6) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga privat di daerah, yang kemudian meningkatkan kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi yang selama ini dilakukan oleh departemen yang ada dipusat
- 7) Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah.
- 8) Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

#### d. Desentralisasi Asimetris (*Assymetric Decentralization*)

Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan kewenangan khusus pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberlakuan desentralisasi asimetris (*assymetric decentralization*) atau otonomi asimetris (*assymetric*

*authonomy*) dimaksud atau diaktualisasikan melalui pemberian status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris (*assymetric decentralization*) atau otonomi asimetris (*assymetric authonomy*), merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan istimewa.<sup>32</sup>

Desentralisasi asimetris diberlakukan di daerah tertentu dalam pelbagai hal misalnya otonomi khusus dalam hal ekonomi, politik, kebijakan fiskal, kesejarahan, administratif, sampai budaya dan kearifan lokal. Misalnya seperti yang terjadi di NAD, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua.

Dalam tataran teknis lapangan desentralisasi asimetrik (*assymetric decentralization*) memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut;<sup>33</sup>

1. Sebagai solusi terhadap konflik yang cenderung akan terjadi pada etnis daerah yang akan diterapkan desentralisasi asimetrik ini. Artinya desentralisasi asimetrik dapat memberikan solusi awal baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
2. Sebagai respon demokratis dan rasa damai terhadap keluhan atau masalah yang dihadapi kelompok kaum minoritas yang hak-haknya selama ini cenderung dilanggar atau kurang diperhatikan. Dalama hal ini bila dilihat seperti yang terjadi NAD, dimana Aceh dikhususkan untuk boleh

---

<sup>32</sup>Mohammad Abud Musa'a : Disampaikan dalam Simposium Nasional Papua "Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan" tanggal 7-9 April 2010, di Universitas Indonesia Jakarta.

<sup>33</sup> <http://www.fisip.ui.ac.id/papua/images/oziodownload/musaad.pdf> akses 18 oktober 2011

mendirikan partai politik lokal, mendapatkan dana alokasi khusus yang lebih besar sebagai manifestasi desentralisasi asimetrik itu sendiri.

3. Sebagai bentuk pengistimewaan daerah baik secara fiskal perekonomian maupun secara hal politik. Misalnya di Papua yang memiliki desentralisasi asimetrik di bidang ekonomi.

#### 4. Analisis SWOT

Manajemen strategi dalam sebuah disiplin ilmu memiliki beberapa konsepsi analisis dan metode lainnya salah satunya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan perusahaan Fortune 500.<sup>34</sup>

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan

---

<sup>34</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_SWOT](http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT) akses 20 April 2012

(*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisis SWOT selain di gunakan di bidang bisnis dan ekonomi, juga dapat digunakan untuk menganalisis pada kasus politik salah satunya adalah sikap politik. Analisis SWOT tidak jauh berbeda bila di gunakan pada bidang politik , *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* digunakan untuk melihat seberapa, kekuatan sikap politik, kelemahan sikap politik, peluang dari sikap politik yang diambil dan apakah ancaman yang akan muncul jika sikap politik yang telah diambil.

- a. *Strengths* adalah kekuatan perusahaan atau dalam politik adalah kekuatan organisasi politik akan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan sebuah keunggulan dalam bersaing.
- b. *Weakness* adalah kelemahan dari sebuah organisasi politik atau isu politik yang akan diambil, kelemahan dapat saja meliputi reputasi organisasi partai yang buruk, penurunan elektabilitas, serta konflik antar pengurus partai.
- c. *Opportunities* adalah peluang suatu organisasi politik ketika partai politik lain tidak dapat memberikan sebuah solusi dan memberi

kebijakan yang baik terhadap publik. Peluang juga dapat dilihat ketika sebuah situasi politik yang menguntungkan bagi suatu isu politik tertentu diambil.

- d. Threats adalah ancaman suatu organisasi politik yang ditimbulkan dari pihak luar atau bahkan dari dalam organisasi partai sendiri. ancaman dapat saja datang dari perlawanan organisasi politik yang menjadi rival atau lawan, dapat juga datang dari perlawanan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>35</sup>

Analisis SWOT dapat dikembangkan untuk menerapkan sebuah strategi dengan melihat semua unsur *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* yang kemudian merumuskan strategi yang pas. Ada pun metriks analisis SWOT sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Metriks Analisis SWOT**

|                           | INTERAL           |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Strengths         | Weaknesses        |
| EXTERNAL<br>Opportunities | S-O<br>Strategies | W-O<br>Strategies |
| EXTERNAL<br>Threats       | S-T<br>Strategies | W-T<br>Strategies |

Sumber : Freddy Rangkuti SWOT Balanced Scorecard 2011

<sup>35</sup> <http://supandir.wordpress.com/2008/12/19/swot-analysis/> akses 19 april 2012

## 5. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pengolahan desentralisasi atau otonomi daerah juga dikenal dengan otonomi khusus yang diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pusat kedaerah untuk menjalankan kebijakan tertentu yang sifatnya sangat istimewa baik itu pembangian hasil sumber daya alam seperti di Papua, Penegakan hukum syariah kearifan lokal seperti di NAD, serta pemberian status keistimewaan terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan yang diperoleh Daerah Istimewaan Yogyakarta diperoleh karena memang status keistimewaan dengan perspektif sejarah bukan karena pertempuran berdarah seperti NAD dan Papua. Keistimewaan Yogyakarta terletak pada beberapa elemen diantaranya sebagai berikut;

1. Pengolahan kebudayaan: elemen keistimewaan Yogyakarta salah satunya adalah aspek budaya. Budaya tidak hanya sekedar dimaknai sebagai atraksi kesenian belaka, namun juga menyangkut banyak spektrum cipta, rasa, dan karsa, baik yang terlembaga pada institusi yang formal maupun tidak.

Ada tiga aspek pokok yang berkenaan dengan relevan budaya sebagai wujud keistimewaan Yogyakarta *Pertama*, Kraton sebagai institusi adat yang melukiskan karya adi lubung (*court culture*). *Kedua*, unsur tranformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan dan yang

*ketiga*, Fungsi sultan sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan islam dengan realitas masyarakat yang pluralis tinggi.

2. Pengolahan pertanahan: Pengolahan pertanahan Yogyakarta dipandang istimewa karena tanah-tanah kraton atau kesultanan sudah sejak dulu menjadi yurisdiksi kekuasaan Yogyakarta. Itu artinya tanah yang ada di kekuasaan Yogyakarta diolah sepenuhnya oleh kraton dan kesultanan.
3. Pengolahan politik dan pemerintahan: Atribut kesultanan merupakan salah satu ciri penting mengenai eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa. artinya keistimewaan Yogyakarta juga terletak pada kepemimpinan kalangan kraton dan keturunan sultan yang ini pada tingkat I saja atau gubernur dan wakil gubernur. Yogyakarta berhak menetapkan Sri Sultan Hamengku Bowono dan Sri Paduka Paku Alaman selaku kepala daerah tingkat I. Hak ini berkenaan dengan adanya perjanjian atau maklumat 5 September 1945.<sup>36</sup>

#### **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan usaha untuk memperjelas pembatasan pengertian antara konsep satu dengan konsep lainnya agar tidak terjadi *over laping* atau kesalahan memahami konsep yang akan dikemukakan apa lagi bersifat multi tafsir.

---

<sup>36</sup> Jawahir Thotowi.,*apa istimewanya yogya?* (yogyakarta; pustaka fahima 2007).,hal 7-22

1. Sikap Politik adalah suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan berfikir (neural) yang kemudian melakukan evaluasi umum atas dirinya sendiri orang lain bahkan organisasi untuk memilih atau tidak memilih, menolak atau menyetujui isu atau objek politik.
2. Partai Politik adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan kepentingan dan cita-cita untuk dapat menguasai kekuasaan pemerintah melalui pemilihan umum agar dapat mewujudkan kepentingan dan cita-cita yang ingin dicapai.
3. Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten dalam upaya menjalankan sebuah keputusan dan kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah pusat untuk di terapkan di tiap-tipa daerah.
4. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* terlibat dalam suatu proyek.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indoensia yang terletak di Pulau Jawa yang memiliki hak keistimewaan yang terletak pada, pengolaan pertanahan, pengolahan kebudayaan dan pengolahan politik dan pemerintahan.

## **G. Aspek Penelitian**

Aspek penelitian dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk menerangkan aspek penelitian memberikan batasan-batasan yang variabel agar mencapai tujuan penelitian. Untuk penelitian analisis sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta diperlukan aspek penelitian sebagai berikut;

### **1. Aspek Arah**

Aspek arah adalah sikap terpilih pada dua arah kesetujuan, apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memilih atau tidak memilih. Hal ini kemudian yang mengarahkan pada apakah anggota DPD Partai Demokrat Daerah Istimewan Yogyakarta memilih arah sikap politik setuju atau tidak setuju, menolak atau menerima dan mendukung atau tidak mendukung status keistimewaan Yogyakarta. Yang kemudian diskalakan dengan;

- a) Menerima keistimewaan
- b) Menolak keistimewaan

### **2. Aspek Intensitas**

Aspek intensitas maksudnya kekuatan atau kedalaman sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Aspek

intensitas dalam sikap politik DPP Partai Demokrat dengan DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta mungkin saja sama-sama kuat atau dalam untuk menerima atau menolak substansi keistimewaan Yogyakarta, namun arah sikap politiknya bisa saja akan berbeda. Misalnya sikap Politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta setuju atau tidak setuju dengan keistimewaan Yogyakarta namun sikap politik DPP Partai Demokrat bisa saja sangat tidak setuju atau sangat setuju dengan keistimewaan Yogyakarta. Perbedaan inilah yang disebut dengan Intensitas sikap hal ini kemudian diskalakan dengan;

- a) Kuat atau dalam
- b) Tidak kuat atau tidak dalam

### 3. Aspek Keluasan

Aspek keluasan maksudnya kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada aspek sikap. Aspek keluasan dalam sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap keistimewaan Yogyakarta secara spesfik atau menyeluruh pada tiga subtansi dasar keistimewaan Yogyakarta. Misalnya sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menyetujui satu dari tiga

substansi dasar namun sikap politik DPP Partai Demokrat bisa saja menolak keseluruhan substansi keistimewaan Yogyakarta. Ini lah yang disebut dengan Keluasan sikap yang kemudian diskalakan dengan;

- a) Luas
- b) Tidak luas

#### 4. Aspek konsistensi

Aspek konsistensi adalah aspek dimana sikap yang diambil sesuai dengan kesetujuan tindakan. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Artinya apakah sikap politik yang diambil anggota DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap satatus keistimewaan Yogyakarta telah konsisten. Dan akan diukur dengan skala;

- a) Konsisten
- b) Tidak konsisten.

## **H. Metode Penelitian**

### **I. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menerangkan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang

bertujuan untuk menggali data sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui rangkayan kata-kata.<sup>37</sup>

## 2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis penelitian adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Jenis Data

Data yang akan dipakai dan dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “analisis sikap politik DPD Partai Demokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta tahun 2009-2011 “ ini adalah.

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini diperoleh langsung dari sumber yang berupa keterangan-keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### b) Data Sekunder

---

<sup>37</sup> Surahmad Winarto, *Dasar dan Teknik Research pengetahuan metode ilmiah*, (Bandung; Tarsito 1999), hal 13

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber. Data ini diperoleh dari sumber-sumber lain seperti tulisan dalam koran media cetak, jurnal, website dan beberapa sumber-sumber yang sifatnya pustaka.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sebagai penunjang dalam penelitian ini ada beberapa teknik atau metode yang akan dipakai yaitu sebagai-berikut;

##### a. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ini adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan langsung menanyakan atau mewawancarai narasumber atau sumber data secara langsung baik terstruktur maupun tidak. Namun dalam penulisan ini wawancara tidak terstruktur yang akan dipilih karena untuk memperoleh data yang dalam. Dalam penelitian ini yang akan diwawancara adalah Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Putut Wiryawan, Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta Sutan Imran,SH dan Direktur Daerah I DPD

---

<sup>38</sup> Lexy j.moeleong, *op. cit.*, hal 245

Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Abdul Razak,S.ip

Adapun data yang akan dihimpun adalah sebagai berikut; Sejarah pendirian partai, visi-misi partai, konsep serta ideologi partai, sistem pengambilan keputusan dan sikap politik partai dan hal-hal lainnya.

#### b. Dokumentasi

Demi melengkapi data utama yang langsung diperoleh dari narasumber, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dimana peneliti akan menghimpun data-data melalui dokumentasi yang masih relevan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Adapun data dokumentasi yang diperlukan adalah Risalah pendapat fraksi Partai Demokrat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan undang-undang keistimewaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, dan hasil rapat kerja daerah DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Teknik Analisis Data

Mengingat dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh dalam

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *metodelogi penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D.*,(Bandung;alfabeta 2011).,hal 137-142 cetakan xiii

penelitian ini tidak dianalisis menggunakan angka-angka, tetapi melainkan data yang diperoleh akan diklasifikasikan atau dikategorikan dan kemudian dideskripsikan, serta kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat tersistematisasi yang mengenai faktor-faktor atau berhubungan dengan keadaan yang sedang diselidiki tanpa menggunakan hitungan statistik. Artinya setelah memperoleh data baru kemudian ditafsirkan atau dianalisis<sup>40</sup>. Selain itu data yang diperoleh juga dianalisis menggunakan pendekatan SWOT untuk menyajikan hasil analisis yang lebih mendalam.

---

<sup>40</sup> Lexy j. Moeleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya,1989),hal 56